

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PULO GAJAH MATEE KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH 2017

Musliadi¹, Nurhayati², Dendi Sutarto³, Muhammad Solihin⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
edymusliadi52@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
nurhayati@fisip.unrika.ac.id

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
dendi_sutarto@yahoo.co.id

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
solihin@fisip.unrika.ac.id

Abstrak

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan dana Desa di Pulo Gajah Matee tahun 2017. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang ada, yaitu program sarana prasarana pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih sangat kurang dan lemah dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di desa Pulo Gajah Matee Aceh tahun 2017. Masalah yang dihadapi kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa Pulo Gajah Matee Aceh masih belum sesuai dengan harapan prioritas penggunaan dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa Pulo Gajah Matee Aceh yang bervariasi dalam mengelola anggaran desa tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstrack

Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for villages are transferred through the Regency/City Revenue and Expenditure Budget and are used to finance the administration of village governance which includes services, development, and community empowerment. Implementation of the use of village funds in Pulo Gajah Matee in 2017. In the use of village funds there are several problems, namely the infrastructure program for village community empowerment. This study uses qualitative research methods, this study shows that the village government is still very lacking and weak in implementing the use of village funds in Pulo Gajah Matee Aceh village in 2017. The problem faced is the lack of communication in the implementation of village funds which can affect the weak participation of the community to take part in the program realization of village funds. The implementation of the Pulo Gajah Matee Aceh village fund program is still not in line with the expectations of the priority use of village funds. This is due to the varied needs of Pulo Gajah Matee Aceh village in managing the village budget.

Keywords: Implementation, Village, Fund Allocation, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Desa diberikan hak otonomi dalam mengelola Desanya secara mandiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjalankan program infrastruktur desa dan program pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah memberikan Dana Desa ke Desa membentuk kepedulian Pemerintah dalam memajukan Desa.¹ Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan dana Desa Pulo Gajah Matee terhadap program bantuan sarana produksi, distribusi, dan pemasaran usaha ekonomi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Transfer dana untuk desa yang di dapatkan untuk mengembangkan desa melalui program pembangunan infrastruktur desa dan program pemberdayaan masyarakat desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Tabel 1. Dana Desa per Desa Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

Tahun	Dana Desa	Rata-Rata Dana Desa per Desa
2015	20,76 T	280,3 Juta
2016	46,98 T	643,6 Juta
2017	60 T	800,4 Juta

Sumber : Dialog Media PKSANHAN-LAN 2017

Tabel 1 rata-rata dana desa per desa tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dana desa per desanya. Pada tahun 2015 dana desa yang di dapat berjumlah 20,76 Triliun yang dibagi rata-rata dana desa per desa mendapatkan 280,3 Juta, tahun 2016 dana desa yang di dapat berjumlah 46,98 Triliun yang dibagi rata-rata dana desa per desa sebesar 643,6 Juta, pada tahun 2017 dana desa yang di dapatkan berjumlah 60 Triliun yang rata-rata dana desa per desa mendapatkan 800,4 Juta. Tiap desa mendapatkan dana desa yang di dapatkan untuk menjalankan otonomi desa yang bertujuan untuk mengembangkan desa yang manju dan berkembang. Dana desa yang diterima tersebut dibagikan kepada 730 desa, termasuk Desa

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pulo Gajah Matee. Adapun dana desa yang diterima oleh Desa Pulo Gajah Matee pada tahun 2017 sebesar Rp 735.259.530,-. Dana desa yang diterima tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk membiayai pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. Bantuan Dana Desa Bagi Desa Pulo Gajah Matee Tahun 2016-2017

Tahun	Bantuan Dari APBN	Bantuan Dana Desa Dari APBD
2016	577,3 juta	116,7 juta
2017	735,2juta	135,8 juta

Sumber : kantor Desa Pulo Gajah Matee, 2017

Dari Tabel 2 di atas, dapat di lihat bahwa bantuan dana desa yang di dapat gampong Pulo Gajah Matee ada nya peningkatan tiap tahun nya dengan jumlah yang besar. Karena dari tahun 2016 sampai 2017 ada peningkatan sebesar 158 juta dari jumlah awal tahun 2016. Sedangkan dari APBD dari tahun 2016 sampai 2017 ada peningkatan dari jumlah awal tahun 2016. Adapun penggunaan dana desa yang mengaju pada Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017. Maka Gampong Pulo Gajah Matee menetapkan Anggaran Belanja Tahun 2017 di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar RP. 123.656.500. dan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 59.696.54.

Beberapa informasi dan kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Karena dalam hal ini penggunaan dana desa di nilai sensitif jika di hadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Maka banyak penilaian dari masyarakat desa Pulo Gajah Matee dalam pelaksanaan penggunaan dana untuk sarana dan prasarana desa tahun 2017 dalam program pemberdayaaan masyarakat desa masih dianggap kurang transparansi untuk penetapan program dan anggaran program bidang pemberdayaan masyarakat.

METODELOGI

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono (2019) dengan metode deskriptif analisis, penggunaan metode ini di dasari oleh beberapa hal yakni, peneliti bisa lebih leluasa mengkaji lebih dalam melalui wawancara secara mendalam tentang objek yang akan diteliti. Selain itu, peneliti bisa melihat lebih dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa Untuk Sarana Dan Prasarana Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa Pulo Gajah Matee dalam menekankan Penggunaan Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur untuk mengetahui informasi data melalui informan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee, Badan Permusyawaratan Desa Pulo Gajah Matee, dan Masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Penelitian ini, berfokus pada Implementasi Penggunaan Dana Desa Untuk Sarana Dan Prasarana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui berbagai teknik atau cara, baik dengan menggunakan wawancara, observasi, maupun dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang ada.

PEMBAHASAN

Desa Pulau Gajah Mate merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.²

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian upaya penyampaian informasi kepada masyarakat, pihak Kantor Desa Pulo Gajah Matee telah melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pulo Gajah Matee mengenai program yang akan dibuat selanjutnya oleh tokoh masyarakat menyampaikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dibuat kepada masyarakat.

Penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat rendah karena hanya melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat saja tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturn Kantor Desa Pulo Gajah Matee masyarakat ada yang tidak tau terhadap perkembangan yang akan dilaksanakan di Desa Pulo Gajah Matee.

Masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan masyarakat desa harus mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee. Pemerintah Desa harus

² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

membangun komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat desa perlu adanya pendekatan yang langsung oleh pegawai Pemerintah Desa.

Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan dari otonomi desa dalam melaksanakan pemerintah desa dan mengelola desa secara mandiri. Desa memiliki potensi yang sangat berpengaruh pada pembangunan nasional. Selama ini, desa yang ada di Indonesia sangat mengalami ketertinggalan kemajuan pembangunan dan kemajuan teknologi informasi. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama.

Menurut Sumaryadi (2005) kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Komunikasi yang dibangun dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, program pemberdayaan masyarakat desa sangatlah diperlukan pelaksanaan dana desa yang tepat sasaran.

Komunikasi harus dilakukan dari masyarakat hingga pelaksanaan program. Musyawarah desa bertujuan untuk menerima masukan ataupun usulan masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) berperan sebagai wakil masyarakat untuk menyampaikan usulan masyarakat yang akan dibahas pada kegiatan musyawarah desa.

Sasaran Kebijakan

Menurut Reoati (2003) sasaran kebijakan Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee harus dilakukan dengan tetap sasaran. Alokasi dana desa, dana desa sangat bertujuan untuk melakukan kemajuan desa dari program pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya Desa.

Menurut M Anwas (2013) program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee diikuti masyarakat desa. Sebagai bentuk

partisipasinya masyarakat desa terhadap program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

Sumber Daya

Sumber daya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses. Dana desa, dana alokasi desa dibutuhkan sumber daya yang dapat menerapkan untuk kemajuan desa dari pembangunan infrastruktur desa dan sumber daya masyarakat yang kompeten. Sumber daya yang menjalankan Pemerintahan Desa, harus di dukung dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial atau Anggaran.

Sumber daya pegawai Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee sangat berpengaruh terhadap implementasi Dana Desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Pegawai Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee harus berkerja secara efektif dan akuntabel. Selain melaksanakan secara efektif dan akuntabel, pegawai Pemerintah Desa harus membangun komunikasi yang tepat sasaran.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee mengurus otonomi desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Desa diberikan kewenangan untuk membangun desanya secara mandiri, baik pembangunan sumber daya infrastruktur desa dan pembangunan sumber daya manusia yang efektif. Program pemberdayaan masyarakat desa sangat membantu kemampuan masyarakat dalam keahlian dalam berkerja dan memberikan pengetahuan ilmu yang di dapat, agar dapat terlaksana kemandirian masyarakat. Anggaran desa dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber Daya Manusia

Program pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Masyarakat menerima program pemberdayaan masyarakat bermanfaat mendapat pengetahuan dan keterampilan. Masyarakat pertanian dan

masyarakat perkebunan sangat perlu mendapat pemberdayaan masyarakat desa. Untuk meningkatkan ekonomi melalui pelatihan, dan kegiatan lain.³

Perkembangan sumber daya manusia harus di dukung dengan kebutuhan kesehatan pada masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dapat diarahkan kedua aspek tersebut aspek fisik dan non fisik. Meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi, sedangkan dalam meningkatkan kualitas non fisik dapat dilakukan dengan upaya pendidikan dan pelatihan.

Sumber Daya Finansial atau Anggaran

Anggaran pendapatan Desa Pemerintah Gampong Pulo Gajah Matee berjumlah 875.199.339,00 yang terdiri dari uraian Pendapatan Asli Gampong, Hasil Usaha Gampong, Pendapatan Transfer, Dana Gampong, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Gampong. Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee diawasi oleh Bapan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulo Gajah Matee yang memiliki kewenangan terhadap anggaran pendapatan. Selain itu, anggaran belanja Desa Pemerintah Gampong Pulo Gajah Matee tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 3. Anggaran Belanja Desa Pemerintah Gampong Pulo Gajah Matee Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	132.860.085,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	620.972.935,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	32.684.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.656.500,00
5.	Bidang Tidak Terduga	787.748,00
	Jumlah Belanja	910.961.258,00
	Surplus/ (Defisit)	35.761.929,00

Sumber: kantor Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee, 2017

Tabel 3 Anggaran Belanja Desa Pemerintah Gampong Pulo Gajah Matee tahun anggaran 2017 dengan jumlah belanja 910.961.256,00 dan Surplus/Defisit 35.761.929,00 dengan uraian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tidak Terduga. Dari Anggaran Pemebelajaan Dana Desa yang dilakukan oleh

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Pemerintah Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana Desa dalam menjalankan program-program bidang.

Dana Desa atau Anggaran Desa terdapat sumber asal yang terdapat 4 sumber dana Desa. Anggaran yang dipagu, pagu anggarannya itu yaitu jumlah anggaran bagi masing-masing desa itu berbeda-beda anggaran yang di berikan. Contoh seperti tahun ini desa kita ini menerima dana desa 800 sekian adapun desa lain ada yang menerima 600 sampai 1 miliar, itu tergantung pagu desanya. Dari pagu anggaran desa tersebut, ketika kita mau pagu ,maka masyarakat desa melakukan dengan membuat rapat atau yang di sebut Musrenbangdes (musyawarah masyarakat desa).

Disposisi

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan program Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan yang lebih maju. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses perubahan masyarakat yang lebih mandiri dan pengetahuan. Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee harus dapat melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Desa, agar bisa mengikuti program pemberdayaan masyarakat Desa. Pendekatan ke masyarakat Desa, bisa dilakukan dengan mendorong atau memotivasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Menurut Winarni (1998) program pemberdayaan masyarakat Desa Pulo Gajah Matee dilakukan menggunakan Dana Desa yang masuk ke Desa Pulo Gajah Matee. Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dana Desa yang bertujuan untuk melakukan kepentingan masyarakat Desa.

Watak dan Karakteristik

Watak dan karakteristik masyarakat petani di Desa Pulo Gajah Matee masih tradisional dan pemahamannya masih jauh dari ketertinggalan kemajuan. Waktu yang masih tradisional harus dapat perhatian dari Pemerintah. Bentuk dari Pemerintah termasuk dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Masyarakat desa yang masih mendengar Ketua adat, Tokoh masyarakat desa ataupun orang tua yang dianggap menjadi panutan masyarakat desa. Pemerintah Desa harus mendekatkan diri kepada Ketua adat atau tokoh masyarakat desa yang dapat mengajak masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen

Komitmen Pemerintah terhadap Desa terdapat Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa sangat berpengaruh pada pembangunan nasional dan cita-cita leluhur bangsa. Selain itu, desa mendapatkan dana desa yang berasal Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) berjumlah 1 Miliar tiap Desa. Dana Desa yang di dapat untuk mengatur sendiri kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Kemandirian dan kesejahteraan dilakukan dalam program kebijakan Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee seperti pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan kualitas desa efektif dan program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kemandirian. Berikut ini Alokasi Dana Desa Di Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee tahun 2017;

Tabel 4. Alokasi Dana Desa Di Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan	135.855.556,00
2.	Belanja	142.185.580,00
3.	Pembiayaan	6.330.024,00
	Jumlah	284.371.160,00

Sumber: *Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee 2017*

Tabel 4 Alokasi dana Desa di Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee tahun 2017 berjumlah 284.371.160,00 dengan uraian dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Dana desa yang diolah oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee untuk menjalankan pembangunan infrastruktur desa dan program pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana Desa merupakan anggaran desa yang bersumber dari perencanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa Pulo Gajah melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya, Pemerintah Desa Pulo

Gajah Matee harus dapat menggunakan dana desa yang efektif dan akuntabelitas menggunakan dana desa.

Kejujuran

Kejujuran Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee melaksanakan dana desa atau anggaran desa secara akuntabilitas. Dengan akuntabilitas, Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee melaksanakan program dari Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tindakan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee bentuk kejujuran dalam menjalankan kebijakan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat petani melalui kelompok tani dapat memperoleh informasi-informasi yang mereka butuh mengenai apa saja yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Masyarakat tani bersama kelompok tani dapat melakukan kajian menyeluruh untuk mengembangkan rencana aktivitas bertani mereka ke depan agar lebih mandiri dan terarah. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat masyarakat petani yang ada di Desa Pulo Gajah Matee kurang dalam melakukan inovasi kegiatan pertanian mereka. Masyarakat petani yang ada disana hanya fokus kepada produksi padi saja sehingga perlu adanya kegiatan bercocok tanam aneka tanaman yang lain untuk menambah hasil panen mereka.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standar operasional prosedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian mendapatkan akses terhadap (Widjaja: 2003) pendidikan dan kesehatan yang baik. Maka demikian, diperlukan

pembangunan yang cepat dan didukung oleh pemberdayaan masyarakat desa saling yang bersinergi.

Standar operasional prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) birokrasi Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee melaksanakan tugasnya melayani masyarakat Desa Pulo Gajah Matee sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Desa dan pembangunan infrastruktur desa dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pelayanan Publik di Kantor Desa Pulo Gajah Matee yang memiliki pelayanan berdasarkan *standar operasional prosedur (SOP)*. Kinerja pegawai Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee memberikan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Pulo Gajah Matee. Selain memberikan pelayanan ke masyarakat. Pegawai selalu siap stanby di Kantor Desa Pulo Gajah untuk menerima permasalahan yang ada di masyarakat desa.

Menurut Fhadil (2013) (Kemajuan desa tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam menerima sasaran dari pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan mengawasi pelaksanaan anggaran dana desa. Birokrasi pemerintahan desa dapat menunjang kemajuan desa dengan menjalankan roda pemerintahan desa yang profesional sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Desa. Keterlibatan unsur dalam meningkatkan kemajuan desa dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee dalam menjalankan program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Pulo Gajah Matee yang menjalankan anggaran Desa dan menjalankan roda pemerintahan desa, pemerintah desa melakukan kegiatan pertahun dalam menjalankan anggaran desa yang masuk ke desa Pulo Gajah Matee

KESIMPULAN

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) Kabupaten Kulon Progo merupakan kelompok pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat pedukuhan yang keanggotaannya mencakup keluarga Sejahtera, Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Miskin Absolut. Keikutsertaan Keluarga Sejahtera dalam KAKB dimaksudkan sebagai motivator dan inovator kegiatan dalam kelompok sehingga memacu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Miskin Absolut untuk bangkit dan Memberdayakan diri. Berdasarkan hasil penelitian, maka secara keseluruhan peneliti menilai bahwa kondisi/pelaksanaan (*actual*) program KAKB di Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon progo sudah sesuai dengan rencana (*planned*).

Selain itu, peneliti menilai program KAKB dapat memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota KAKB di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo dengan adanya tambahan pendapatan yang diperoleh anggota kelompok melalui usaha yang dijalankan oleh kelompok serta hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Adapun saran Berikut saran-saran yang peneliti berikan berkaitan dengan program KAKB:

1. Program KAKB untuk kedepan bisa lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi kelompok dan dapat dicarikan solusi lebih awal untuk menghindari kelompok berada dalam fase vakum/berhenti sementara.
2. Memberikan pelatihan pemasaran melalui online kepada masing-masing kelompok agar memiliki wadah untuk menjual produk lebih luas lagi
3. Perlunya peran aktif berbagai instansi yang terlibat untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi lebih intensif agar KAKB dapat lebih baik dalam menarik minat masyarakat untuk mengembangkan usaha dan permodalan yang telah diberikan.

Kelompok harus lebih disiplin dalam membuat laporan keuangan agar memudahkan pemerintah dalam melakukan proses evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadil, Fathurrahman. (2013). “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Program Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lambung Mangkurat Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- M. Anwas, Oos. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Renoati, Reni. (2003). *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, (Mimbar Hukum UGM).
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
-, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumaryadi. I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Winarni, Tri. (1998) *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.